

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah manfaat audit operasional pada Bank Jabar yang berlokasi di Jl. Braga No. 12 Bandung, untuk lebih mengenal lebih jauh tentang perusahaan tersebut, di bawah ini diuraikan mengenai sejarah perusahaan.

3.1.1 Sejarah Singkat Bank Jabar

Bank Jabar demikian sebutan untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat milik Pemerintah Daerah Jawa Barat. Pendiriannya dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1960 tentang Peraturan Perusahaan di Indonesia milik Belanda yang berkedudukan di Bandung, yaitu N. V. Denis (*De Eerste Nederlandshe Indische*) berdasarkan ketentuan ini, semua anak perusahaannya dinyatakan dinasionalisasi dan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan tersebut, Pemerintah Daerah Jawa Barat mendirikan PT Bank Karya Pembangunan dengan akta notaris Noezar Nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan Nomor 184 tanggal 13 Mei 1961. Untuk pertama kali modal dasarnya Rp 250.000.000,- berasal dari Kas Pemerintah Daerah. PT Bank Karya Pembangunan kemudian disingkat BKP kemudian menjadi Perusahaan Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 7/GKHD/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961. Untuk selanjutnya dikuatkan dengan Peraturan Daerah yang merupakan landasan operasional dilakukan beberapa kali penyempurnaan. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1996, modal dasar Bank Jabar ditentukan sebesar Rp 250 milyar.

Sebelum menempati kantor pusat yang baru, di Jalan Naripan 12-14 Bandung, Bank Jabar menempati gedung eks N. V. Denis terletak di persimpangan Jalan Braga dan Jalan Naripan Bandung, satu-satunya Bank Pembangunan Daerah Jawa barat yang diresmikan oleh Bapak Ir. H. Djuanda Kartawidjaja.

Aktivitas Bank Jabar sebagai Bank Umum, sejak tahun 1992 statusnya meningkat menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/84/KEP/DIR tanggal 22 November 1992. Di samping itu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat mendapat sebutan “Bank Jabar” dan logo baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor II tahun 1995.

Dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan perekonomian dan perbankan, maka bentuk hukum Bank Jabar mengalami perubahan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan akta pendirian Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan akta perbaikan Nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang dibuat oleh notaris Ny. Popi Kuntari Sutresna S.H. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 16 April 1999.

3.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Bank Jabar

Struktur organisasi merupakan sarana yang sangat penting dalam suatu manajemen dan harus ada dalam suatu kegiatan perusahaan, termasuk dalam usaha dibidang perbankan. Struktur organisasi dan uraian tugas dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pembagian kerja, tugas, dan tanggungjawab serta memberikan gambaran tentang kedudukan karyawan di setiap bidang organisasi. Sehingga memudahkan bagi karyawan untuk mengetahui batasan dan wewenang serta tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Bagi suatu perusahaan, dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan harus memiliki struktur organisasi yang baik agar kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan berjalan lancar.

Struktur organisasi merupakan susunan yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungan yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Struktur organisasi digambarkan dalam bentuk bagan yang memperlihatkan hubungan-hubungan dan garis wewenang yang ada. Dengan membentuk struktur organisasi, perusahaan berharap dapat terjalin hubungan yang baik antara atasan bawahan serta adanya pertanggungjawaban yang baik dari masing-masing pemegang jabatan, yang pada akhirnya dapat melaksanakan tujuan perusahaan sesuai dengan yang ditentukan.

Di dalam aktivitas pemberian kredit struktur yang terkait bersama uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin Cabang
 - a. Melakukan wawancara dengan debitur.
 - b. Mengotorisasi disposisi ijin proses atau penolakan pada memo.
 - c. Memberikan keputusan kredit.
 - d. Menandatangani persetujuan keputusan kredit dan SP3K.
 - e. Memberikan legalisasi pemberian kredit.
2. Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit dan Dana Jasa
 - a. Meneliti hasil analisis kredit dan berita acara pemeriksaan dan membandingkan dengan proposal permohonan kredit, dokumen pendukung dan salinan bukti agunan fisik.
 - b. Membuat undangan rapat komite audit.
 - c. Membuat notulen rapat kredit.
3. Analisa Kredit
 - a. Meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung dan membandingkan dengan proposal permohonan kredit.
 - b. Membuat memo ijin proses dan meminta persetujuan pada pemimpin seksi pemasaran kredit.
 - c. Melakukan *on the spot* pada objek usaha dan lokasi jaminan.
 - d. Membuat analisis kredit dan laporan kredit.
4. Pemimpin Seksi Administrasi dan Umum
 - a. Menandatangani persetujuan keputusan kredit dan SP3K.
 - b. Meneliti kwitansi fasilitas kredit, tanda setoran dan kwitansi penerimaan tunai dengan perjanjian kredit.
 - c. Memberikan persetujuan pada kwitansi fasilitas kredit sesuai kewenangannya.
5. Asisten Administrasi Kredit
 - a. Membuat keputusan dan surat SP3K dan membubuhkan paraf.
 - b. Mengirimkan tembusan SP3K kepada calon debitur.
 - c. Membuat perjanjian kredit di bawah tangan atau notariil.

- d. Membuat tanda terima jaminan dan surat pengantar ke notaris untuk pengikatan jaminan.
 - e. Menandatangani perjanjian kredit.
 - f. Melakukan input debitur pada master file komputer.
 - g. Menyerahkan tembusan notulen rapat komite, hasil analisis kredit, dan keputusan kredit kepada seksi supervise kredit.
 - h. Menerima bukti pengikatan dari notaris.
 - i. Menyerahkan surat perjanjian kredit dan tembusan tanda terima jaminan kepada debitur.
 - j. Membuat surat penutupan pertanggungan kredit kepada lembaga penjamin atau asuransi.
 - k. Menyimpan SP3K, tembusan perjanjian kredit, keputusan kredit, hasil analisis kredit, berita acara pemeriksaan agunan fisik dan asli perjanjian kredit pada file tersendiri.
 - l. Menyimpan bukti pengikatan notaris, bukti agunan fisik dan asli perjanjian kredit pada file tersendiri.
 - m. Menyiapkan kwitansi fasilitas kredit, tanda setoran, kwitansi penerimaan tunai dan meminta pengesahan pada pemimpin seksi administrasi dan umum.
 - n. Menyerahkan kwitansi fasilitas kredit, tanda setoran dan kwitansi penerimaan pada bagian teller.
6. Pemimpin Seksi Pelayanan
- a. Memberikan persetujuan transaksi dengan membubuhkan paraf pada bukti transaksi.
 - b. Meneruskan bukti transaksi apabila limit transaksi melebihi kewenangan kepada pejabat yang bewewenang.
7. Teller
- a. Meneliti dan memastikan kebenaran kwitansi fasilitas kredit, tanda setoran, kwitansi penerimaan.
 - b. Melakukan entri transaksi realisasi kredit.
 - c. Meminta persetujuan transaksi dari pemimpin seksi pelayanan jika terjadi over limit transaksi.

- d. Melakukan validasi pada bukti transaksi.
- e. Menyerahkan bukti transaksi pada debitur dan asisten administrasi kredit.
- f. Menyimpan bukti transaksi pada tempat penyimpanan secara berurutan untuk dilakukan pencocokan pada akhir nanti dengan *print out* daftar jurnal transaksi.

3.1.3 Wewenang dan Tanggungjawab Auditor Internal Kredit

Wewenang dan tanggungjawab auditor internal kredit pada PT Bank Jabar terdapat dalam *job description* Kontrol Internal Cabang (KIC) yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap kantor-kantor cabang pembantu dengan maksud membandingkan aturan-aturan atau pedoman yang ada dengan kondisi sebenarnya.
2. Bertanggungjawab atas pemeriksaan khusus (*special investigation*) terhadap masalah-masalah tertentu yang perlu dilaksanakan secara mendadak.
3. Dari laporan hasil pemeriksaan, memberikan masukan dan rekomendasi kepada direksi pusat untuk ditindak lanjuti.
4. KIC Bank Jabar memonitor kualitas dan proses kredit secara priodik dan melaporkannya kepada direksi tentang apakah ketentuan atau standar Bank Jabar dipatuhi atau tidak. Kepada seksi pemasaran bertanggungjawab mengidentifikasi, melaporkan permasalahan kredit untuk mengambil tindakan perbaikan sedini mungkin.
5. KIC Bank Jabar secara berkala melakukan pemeriksaan tersendiri atas perkreditan pada kantor cabang maupun kantor cabang pembantu.
6. Tujuan pemeriksaan di atas adalah untuk :
 - Mengevaluasi prosedur dan praktek serta kepatuhan kepada ketentuan atau peraturan tentang tata cara pengelolaan kredit.
 - Menentukan dan menilai kualitas portofolio kredit hingga saat pemeriksaan dilakukan.
 - Mengusahakan agar program perbaikan atas hasil pemeriksaan yang lalu diselesaikan dengan baik oleh manajemen itu.

3.1.4 Aktivitas Usaha PT Bank Jabar

Secara umum Bank Jabar didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah disegala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Bank Jabar didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya rakyat di Daerah Jawa Barat.

Bank Jabar merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dibidang keuangan atau perbankan dan menjalankan usahanya sebagai bank umum sebagaimana ditetapkan perundang-undangan yang berlaku. Bank Jabar sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah memiliki misi dan fungsi sebagai berikut :

1. Penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah.
2. Pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
3. Salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Jabar melakukan usaha-usaha antara lain :

1. Menghimpun dana, dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut :
 - a. Giro (dalam Rupiah maupun Valas)
 - b. Deposito
 - Deposito Berjangka Rupiah dan Valas
 - Deposito Berjangka Diskonto
 - Sertifikat Deposito
 - c. Tabungan
 - Tanda Mata (Tabungan Anda Masa Datang)
 - Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)
 - Jabar Okey
 - Tabah (Tabungan Ibadah Haji)
 - d. Surat Berharga yang Diterbitkan :
 - Obligasi
- Pola Syariah meliputi :
- Giro Wadiah

- Tabungan :
 - Wadiah
 - Mudharabah
 - Deposito Mudharabah
2. Penggunaan Dana, terutama dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat, untuk berbagai jenis dan sektor usaha yang terdiri dari :
- a. Kredit Umum
 - Kredit Modal Kerja
 - Kredit Investasi
 - Kredit Lainnya
 - b. Kredit Program
 - Dana Subsidi BBM
 - KKPA (Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya)
 - KfW-SME (Kreditanstalt fur Wiederaufbau – Small Medium Enterprises)
 - KfW-IEPC (Kreditanstalt fur Wiederaufbau – Industrial Efficiency and Pollution Control)
 - MAP (Modal Awal Pendanaan)
 - KKP (Kredit Ketahanan Pangan)
 - PKM (Proyek Kredit Mikro)
 - KPKM (Kredit kepada Pengusaha Kecil Mikro)
 - KPRS sehat (Kredit Pemilikan Rumah Sehat)
 - c. Kredit Pola Syariah
 - Kredit Dakabalarea (Kredit Program Pemerintah Daerah Propinsi Jabar)
 - Kredit Proyek Industri Manufaktur, dll.
3. Jasa-jasa Bank
- Untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, Bank Jabar memberikan jasa-jasa sebagai berikut :
- Kiriman Uang
 - Inkaso
 - Jaminan Bank

- Penerimaan Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Pajak, PAM dan Uang Kuliah

4. Bank Devisa

Dalam rangka membantu dan meningkatkan kelancaran kegiatan ekspor atau impor khususnya di Daerah Jabar, transaksi devisa dapat dilayani :

- a. Bidang Ekspor/Impor
 - Pembukaan *Letter of Credit (L/C)*
 - Pembiayaan Kredit Ekspor/Impor
 - Penerimaan Pajak
- b. Jasa-jasa Luar Negeri Lainnya
 - Giro Valas
 - Deposito Valas
 - Transfer dan Inkaso dalam Valuta Asing
 - Jual Beli Valuta Asing

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, Menurut **Moh. Nasir (1999 : 71)**, deskriptif analitis adalah : “Penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia dan hasil penelitian tersebut tanpa dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang”. Dengan demikian deskriptif analitis bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki secara terperinci untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Sedangkan dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan melalui studi kasus artinya penelitian dilakukan pada suatu objek penelitian.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer, yaitu berupa :

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan yang erat hubungannya dengan objek yang diteliti
 - b. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan bagian yang terkait dengan objek yang diteliti dalam perusahaan tersebut
 - c. Kuesioner, yaitu berupa serangkaian pertanyaan tertulis dengan cara menyebarkan daftar isian berupa angket pada sebagian karyawan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data mengenai manfaat audit operasional dalam efektivitas pemberian kredit.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)
- Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku dan referensi lainnya.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan hipotesis deskriptif yang diambil, yaitu “Audit operasional telah bermanfaat dalam pemberian kredit pada Bank Jabar”, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan objek penelitian ke dalam satu variable, yaitu :

- Bermanfaatnya audit operasional dalam efektivitas pemberian kredit

Variabel yang telah disebutkan di atas diukur berdasarkan indikator yang mempengaruhinya, mulai dari alternatif jawaban diproses dan diolah untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam mengukur variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Bermanfaatnya audit operasional untuk efektivitas pemberian kredit	• Audit operasional (oleh pemeriksa intern)	<ul style="list-style-type: none"> • Independensi pemeriksa intern ❖ Status Internal Auditor ❖ Objektivitas • Kompetensi pemeriksa

		<p>intern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program pemeriksaan intern <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tujuan audit Kredit ❖ Prosedur Audit Kredit • Pelaksanaan pemeriksaan intern <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tahap audit pendahuluan ❖ Tahap audit mendalam ❖ Hasil audit • Laporan hasil audit
	Manfaat pemeriksaan operasional untuk efektivitas pemberian kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong efektivitas dan efisiensi • Ketaatan terhadap hukum dan peraturan kredit • Adanya antisipasi risiko kredit • Keuntungan maksimal <p>Terdapatnya alat evaluasi</p>

3.2.3 Pengujian Hipotesis

Audit operasional pemberian kredit dianggap efektif jika dapat membantu manajemen untuk meminimalkan resiko kredit macet. Audit operasional dianggap memadai jika pelaksana audit operasional memiliki independensi dan kompetensi, dan adanya pelaksana audit operasional yang dibagi kedalam 3 tahap yaitu : tahap pendahuluan, tahap audit mendalam, dan tahap pelaporan hasil audit.

Hipotesis akan dibuktikan dengan membandingkan antara indikator-indikator yang telah ditentukan dengan hasil observasi, wawancara dan kemudian

didukung dengan jawaban kuesioner, lalu dibandingkan dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menilai pelaksanaan audit operasional pemberian kredit yang bermanfaat dalam efektivitas pemberian kredit, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data yang telah diperoleh dihimpun.
2. Dilakukan pengolahan data.
3. Apabila data telah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, maka dilakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara indikator-indikator yang telah ditentukan dengan hasil observasi, wawancara dan kemudian didukung dengan jawaban kuesioner, lalu dibandingkan dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sistem Pemberian Kredit Pada PT Bank Jabar Cabang Utama

Salah satu tujuan manajemen yang penting dalam setiap tujuan usaha yaitu pengamanan, begitu juga dengan proses pemberian kredit. Karena kegiatan itu merupakan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan dalam bidang perkreditan. Secara umum pengendalian dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Jabar Cabang Utama adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap syarat administratif dan kelayakan usaha yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit.
- b. Proses analisis dan putusan pemberian fasilitas kredit dilaksanakan secara berjenjang oleh pejabat kredit yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.
- c. Pembinaan terhadap penggunaan dan pengembalian kredit.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian fasilitas kredit adalah suatu upaya agar PT Bank Jabar dapat membantu nasabah dalam mengelola kredit yang telah diterimanya secara tepat, dengan cara memberikan bimbingan maupun pengarahan agar usaha nasabah dapat berkembang sebagaimana dengan tujuan pemberian fasilitas kredit dan pengembalian kredit dapat dicapai tepat waktu.

Untuk memperoleh kredit, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan dipenuhi pemohon kredit sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur oleh bank. Di bawah ini penulis akan berusaha menjelaskan tentang prosedur pemberian kredit secara terinci, yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan Permohonan Kredit

Permohonan kredit langsung dilakukan oleh pemohon (calon nasabah) kepada bank (dalam hal ini ditujukan kepada pimpinan cabang (pincab)) melalui bagian analis kredit dengan menggunakan formulir sendiri yang tidak diatur ketentuannya oleh bank. Atas permohonan tersebut pincab akan meneruskan (mendisposisi) permohonan kredit kepada bagian analis

kredit, melalui pemimpin seksi pemasaran, untuk selanjutnya dituangkan dalam data Permohonan Peninjauan dan Keputusan KPT, dan dicatat dalam register SKPP. Permohonan kredit memulai proses kredit dengan menyerahkan formulir yang telah diisi dengan lengkap dan benar, dalam hal ini yang diteliti oleh penulis adalah kredit pegawai negeri tetap (KPT) yang merupakan aktivitas pemberian kredit yang terbesar diberikan oleh PT Bank Jabar. Atas permohonan tersebut, selanjutnya bagian analis kredit akan melakukan analisa kelayakan terhadap kemungkinan diberikannya fasilitas pinjaman. Dalam data permohonan peninjauan dan keputusan KPT dicantumkan secara jelas mengenai data permohonan, data permohonan kredit, sumber penghasilan, jumlah yang diberikan, kesimpulan dan keputusan kredit serta kelengkapan dokumen persyaratan kredit, seperti kartu pegawai, SK Capeg 80%, SKPN 100%, SK Pangkat terakhir, SKGB terakhir, kartu peserta Taspen, Daftar Perincian Gaji, *foto copy* KTP dan surat nikah suami istri masing-masing satu lembar, pas foto ukuran 4x6 masing-masing suami istri satu lembar, Surat rekomendasi dari kepala dinas atau atasan langsung, surat pernyataan dari yang berwenang, surat pernyataan suami istri dan istri pemohon kredit, Surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari Kop setempat, *Stoffmap* biru, dan Buku tabungan.

2. Tahap Analisis Kredit

Atas permohonan kredit yang diterima, bagian analis kredit akan melakukan analisis kelayakan terhadap kemungkinan akan diberikannya fasilitas kredit, yaitu dengan metode melakukan kunjungan langsung ke kantor calon debitur dengan metode analisis di belakang meja. Kedalaman suatu analisis disesuaikan dengan tingkat risiko dan kompleksitas kredit yang sedang dipertimbangkan. Faktor-faktor yang harus dianalisis dan dievaluasi sesuai dengan **Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 8** yaitu sebagai berikut : "Dalam memberikan kredit, bank umum yang wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan".

Pejabat analis kredit yang harus memeriksa :

- a. Analisis Watak, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar dari pemohon, untuk itu maka pejabat analis kredit harus meneliti perilaku pemohon, dari berbagai informasi yang relevan.
- b. Analisis Kemampuan, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan membayar dari pemohon.
- c. Analisis Modal, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*).
- d. Analisis Kondisi, yang bertujuan mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang hendak dibiayai.
- e. Analisis Agunan Kredit, sebagai unsur pengaman lapis kedua bagi PT Bank Jabar dalam setiap pemberian kredit. Pemeriksaan agunan berupa tanah, bangunan, deposito, kendaraan, dan lain-lain.

Setelah dilakukan analisis, maka pejabat analis kredit akan menyimpulkan hasil analisis berupa penetapan tipe dan struktur kredit yang meliputi besarnya kredit yang diusulkan, jangka waktu, penggunaan kredit, suku bunga, biaya-biaya dan persyaratan lainnya. Selanjutnya akan dilakukan negosiasi dengan pemohon tipe dan struktur kredit tersebut. Semua kegiatan analisa kredit tersebut dituangkan dalam formulir Memorandum Analisa Kredit (MAK).

Pejabat rekomendasi merupakan pejabat independen atau pemimpin seksi pemasaran/pejabat kredit. Lini lainnya di luar pejabat pemrakarsa yang akan melakukan analisa rekomendasi, terhadap analisa dan kesimpulan yang telah dibuat pejabat pemrakarsa, pejabat rekomendasi juga boleh memuat kesimpulan tipe dan struktur kredit yang telah sesuai dengan kondisi calon nasabah, dengan memberikan penjelasan atau alasan tentang rekomendasi berbeda dengan pemrakarsa. Dan hasil analisa rekomendasi tersebut dituangkan dalam formulir Memorandum Rekomendasi Kredit (MRK).

3. Tahap Putusan Kredit

Proses putusan kredit yang dibuat atau dilakukan oleh pejabat pemutus sesuai dengan kewenangannya yaitu pemimpin seksi pemasaran atau pimpinan cabang. Kesimpulan terhadap putusan juga boleh tidak sesuai dengan pemrakarsa atau rekomendasi dengan disertai penjelasan atau keterangan, dan apabila kurang yakin atau untuk lebih memperkuat dari hasil analisa sebelumnya maka pejabat pemutus bisa melakukan kunjungan nasabah. Sebelumnya memberikan putusan kredit, pejabat pemutus kredit harus memeriksa kelengkapan paket kredit.

4. Tahap Akad dan Pencairan Kredit

Setelah mendapat putusan kredit dari pejabat pemutus kredit bahwa pemohon kredit layak dan sudah memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan kredit, maka kantor cabang PT Bank Jabar melakukan akad kredit.

Berdasarkan putusan kredit yang telah disetujui, koordinator analisis kredit/petugas analisa kredit mencatat tanggal putusan kredit dalam register permohonan kredit kantor cabang dan meneliti kembali berkas kelengkapan peket kredit, lalu mempersiapkan :

- a. Surat penawaran putusan kredit yang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - Struktur dan tipe kredit
 - Syarat-syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi nasabah
- b. Surat perjanjian yang dapat dibuat sesuai risiko kredit
- c. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian ikutan dan keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung/menjamin perjanjian pokoknya, sehingga perjanjian pokok hapus, maka perjanjian *accessoir* nya juga turut terhapus.

Setelah melakukan perjanjian kredit, maka dapat dilaksanakan pencairan kredit setelah formulir IPK (Instruksi Pencairan Kredit) ditandatangani oleh pejabat berwenang kemudian petugas analisa kredit mencatat tanggal pencairan kredit dalam register permohonan kredit kantor cabang.

Syarat Penerbitan IPK adalah sebagai berikut :

- Surat perjanjian kredit dan surat perjanjian *accessoir* yang mengikutinya telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- Semua dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan kredit telah lengkap dan telah diperiksa kesalahannya, serta memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi PT Bank Jabar.
- Semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit tersebut telah dilunasi oleh pemohon.

5. Tahap Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Kredit

Pembinaan dan pengawasan kredit adalah suatu rangkaian atau kegiatan yang dimulai sejak permohonan fasilitas kredit diajukan sampai pelunasannya. Adapun cara pelaksanaannya yang secara individual maupun struktural tergantung dari sifat penggunaannya.

- Pembinaan Kredit

Tujuan dari pembinaan kredit adalah untuk memastikan agar kredit yang diberikan tepat sasaran yaitu sesuai dengan rencana penggunaan, sehingga bermanfaat terhadap upaya peningkatan dan pengembangan usaha yang lebih maju, dan agar kredit tersebut dapat kembali tepat waktu dan memastikan debitur dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian kredit yaitu berupa kewajiban pembayaran bunga, angsuran pokok dan kewajiban lainnya.

Pembinaan kredit umumnya dilakukan oleh pejabat kredit lini yaitu *account officer* pembina yaitu biasanya merupakan pejabat pemrakarsa pada saat proses analisa kredit atau juga bisa dilakukan oleh pejabat lini lainnya, misalnya pemimpin seksi pemasaran atau pimpinan cabang.

Dalam melakukan pembinaan pejabat kredit lini minimal sebulan sekali harus melakukan kunjungan lapangan baik ke tempat kerja, usaha, atau lokasi agunan yang hasilnya dituangkan dalam laporan kunjungan

nasabah (LKN), dalam beberapa aspek yang harus diperhatikan antara lain:

1. Perkembangan usaha setelah mendapatkan kredit
2. Kondisi dan nilai agunan
3. Ketepatan pembayaran kewajiban oleh debitur
4. Perubahan-perubahan ketentuan yang mempengaruhi jalannya kredit

Pada umumnya setelah pembinaan kredit merupakan langkah yang cukup strategis dan menentukan keberhasilan pemberian kredit, baik pada sisi debitur dalam mengembangkan usaha maupun bank dalam memperoleh keuntungan atau pengembalian kredit yang tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan.

- Pengawasan Kredit

Tujuan utama dari pengawasan kredit adalah agar kredit yang diterima para calon nasabah dapat benar-benar bermanfaat. Manfaat yang dapat dipetik dari pengawasan ini bagi debitur adalah dalam menunjang perkembangan usahanya, sedangkan manfaat bagi bank adalah terpantaunya kewajiban debitur kepada bank misalnya pembayaran bunga, serta bank dapat mengambil langkah-langkah dini untuk menyelamatkan assetnya terhadap kemungkinan yang terjadi.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi debitur perlu segera ditangani dan diambil langkah-langkah penanganan seperlunya. Apabila kesulitan itu terus-menerus terjadi, maka debitur akan mengalami kerugian dalam usahanya. Dilain pihak debitur mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman dan bunga atas fasilitas kredit yang diperolehnya. Jika keadaan ini terus berlarut-larut, maka sudah pasti dapat diramalkan bahwa debitur tidak akan dapat melunasi hutangnya yang akan timbul yaitu berupa gagalnya pencapaian tujuan pemberian kredit.

Pengawasan yang akan dilakukan oleh pihak bank terhadap debiturnya bukan semata-mata untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan sanksi kepada debitur yang tidak atau lalai melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tetapi pengawasan ini lebih menitikberatkan kepada

pengarahan dan pembinaan debitur, agar dengan demikian usaha debitur menjadi semakin maju dan terus berkembang dan juga tujuan dari pemberian kredit dapat dicapai.

6. Tahap Pengembalian Kredit

Bagi bank pengembalian kredit bukan hanya terdapat jumlah pokok kredit yang telah diberikan kepada debitur, tetapi juga berupa jasa atau bunga atas penggunaan fasilitas kredit tersebut. Pengembalian kredit yang tepat waktu bagi bank sebagaimana perjanjian kredit merupakan salah satu keberhasilan dari pemberian fasilitas kredit, selain itu juga berupa tingkat perkembangan usaha debitur yang cukup signifikan. Ketepatan pengembalian pinjaman sebelumnya juga ditentukan oleh faktor jangka waktu yang tepat serta pembinaan terhadap penggunaan kredit tersebut. Proses pengembalian kredit dapat dilakukan dengan cara angsuran sesuai dengan kondisi *cash flow* debitur, hal tersebut lebih meringankan kewajiban debitur.

Pengembalian kredit untuk jenis fasilitas kredit tertentu seperti kredit modal kerja, terkadang tidak harus kembali atau lunas sebagaimana jangka waktu kredit. Dengan melihat kondisi perkembangan usaha debitur apabila masih memerlukan atau kredit tersebut masih tertanam dalam modal kerja yang terus berputar, maka dapat dilakukan review atau perpanjangan kredit setelah dilakukan analisa kembali tentang kelayakan untuk diberikan perpanjangan kredit sebagaimana proses pemberian kredit pada awalnya. Penerimaan angsuran dapat dilakukan di kantor cabang, di luar kantor, lewat transfer, dan lewat nota pelimpahan.

Setelah membahas uraian prosedur di atas, maka dapat dikatakan prosedur kredit yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan tahapan prosedur yang ada.

4.2 Pelaksanaan Audit Operasional atas Pemberian Kredit di PT Bank Jabar Cabang Utama Bandung

Pelaksanaan audit operasional dilakukan oleh internal auditor atau disebut Kontrol Intern Cabang (KIC) yang ada di PT Bank Jabar. Audit terhadap bank ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan, penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan-peraturan maupun untuk menilai kinerja usaha dari bank itu sendiri. Pelaksanaan audit oleh KIC PT Bank Jabar setiap enam bulan sekali, dengan maksud apakah prosedur, ketentuan atau pedoman yang berlaku telah dilaksanakan secara memadai. Hal tersebut dapat dilihat melalui komponen-komponen dari audit operasional kredit yang dibahas di bawah ini.

4.2.1 Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Operasional di PT Bank Jabar

Secara khusus, ruang lingkup audit operasional bagian kredit adalah :

1. Apakah hasil atau manfaat yang diinginkan telah dicapai secara objektif, meliputi tentang hasil manfaat yang dicapai oleh aktivitas pemberian kredit yang telah mencapai tujuan dan telah ditetapkan secara efektif, adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan ialah sebagai berikut :
 - a. Kegunaan dan kewajaran kriteria yang digunakan telah dicapai secara objektif, meliputi penilaian tentang hasil atau manfaat yang dicapai oleh aktivitas pemberian kredit untuk menilai efektivitas pencapaian hasil program.
 - b. Ketetapan cara yang digunakan dalam aktivitas perencanaan pemberian kredit untuk menilai efektivitas pencapaian hasil program.
 - c. Ketelitian data yang dikumpulkan.
 - d. Apakah hasil yang dicapai dapat dipercaya kebenarannya.
2. Pemisahan tugas pembayaran, penagihan, analisis, administrasi kredit dan transaksi agunan.
3. Pinjaman yang telah disetujui oleh pihak berwenang, ditelaah oleh KIC.
4. Penilaian seksama permohonan kredit.

5. Rekonsiliasi periodik atas buku besar kredit dengan sub buku besar.
 6. Penelaahan secara berkala posisi pinjaman, penghapusan dan kredit macet.
 7. Pengecekan kelengkapan, kecermatan dan keabsahan dokumen kredit.
- Sedangkan tujuan dari audit operasional atas pemberian kredit oleh Kontrol Intern Cabang adalah untuk membantu kantor cabang dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan prosedur-prosedur atau peraturan-peraturan kerja yang telah ditetapkan oleh direksi.

4.2.2 Independensi Auditor Operasional Kredit

Kedudukan audit operasional pada PT Bank Jabar berbeda dengan bagian lainnya. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Status Organisasi

Kedudukan Kontrol Intern Cabang (KIC) PT Bank Jabar dalam struktur organisasi berada di bawah dewan direksi, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak mudah untuk dipengaruhi.

2. Objektivitas

Dalam perancangan, penerapan dan pengoperasian prosedur pada PT Bank Jabar Kontrol Intern Cabang tidak terlibat di dalamnya, melainkan hanya menilai, dalam hal ini apakah kredit yang diberikan dapat kembali sesuai yang diharapkan.

4.2.3 Kompetensi Auditor Operasional Kredit

Kompetensi auditor operasional pada PT Bank Jabar, yang disebut Kontrol Intern Cabang saat ini yang terdiri dari satu orang auditor ini dapat dinilai sudah memiliki kemahiran profesional dan juga memiliki kecakapan dan keahlian mengenai pemeriksaan fakta mengenai pemberian kredit, dengan pendidikan sarjana (S1) yang menguasai berbagai disiplin ilmu dari jurusan pengetahuan tentang auditing, akuntansi dan komputer, yang dapat mempertimbangkan dengan objektif informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan yang diolah dengan menggunakan komputer yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawab pemeriksanya. Untuk meningkatkan kualitas auditor operasional, mereka

diberikan pelatihan, kursus-kursus singkat mengenai masalah-masalah yang bisa terjadi di bank, sehingga auditor dapat mengatasi masalah tersebut.

4.2.4 Program Audit Operasional Kredit

Dalam program audit operasional kredit pada PT Bank Jabar merupakan daftar pemeriksaan kredit adalah sebagai berikut :

- Tujuan Audit Kredit
- Prosedur Audit Kredit

Program audit kredit ini disiapkan oleh Kontrol Intern Cabang (KIC) bagi tim pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaannya. Program audit yang paling relevan dengan perkreditan adalah sebagai berikut :

- **Tujuan Audit Kredit**

1. Untuk menjamin keamanan kredit yang diberikan, yang merupakan terjaminnya pembayaran kredit dari debitur.
2. Untuk menjamin perolehan bunga atas kredit.
3. Untuk meyakini bahwa seluruh transaksi kredit dibukukan dengan cermat.
4. Untuk menilai keabsahan kredit yang diberikan.
5. Untuk menilai apakah jaminan atas kredit telah memadai.
6. Untuk menilai struktur pengendalian intern kredit dan memberikan saran perbaikan.

- **Prosedur Audit Kredit**

1. Menilai kecermatan informasi kredit yang berkaitan dengan perhitungan bunga dan meyakini bahwa tingkat bunga telah sesuai dengan surat perjanjian kredit dan mengecek perhitungannya.
2. Memeriksa kelengkapan transaksi melalui rekonsiliasi yang menyeluruh antara pinjaman yang diberikan untuk setiap jenis dengan pendapatan bunga.
3. Mengecek keberadaan dan keabsahan pinjaman dengan cara :
 - a. Cocokkan data *master file* kredit ke kredit file : nomor rekening, nama, alamat nasabah, plafond, tingkat bunga dan lain-lain. Terkadang auditor melakukan pengecekan dengan menggunakan telepon kealamat debitur yang sedang dicek.

- b. Tentukan apakah nasabah tidak termasuk dalam black list yang dikeluarkan oleh pihak bank.
 - c. Periksa apakah otorisasi atas pemberian kredit sesuai dengan ketentuan bank.
 - d. Adakah penelaahan apakah nasabah telah menandatangani masalah kredit.
 - e. Yakin bahwa penilaian kredit telah dilakukan secara seksama (5C), dengan mereview laporan hasil penilaian kredit yang dibuat oleh analis kredit.
 - f. Periksa apakah pemberian kredit kepada nasabah tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit.
4. Periksa bahwa agunan yang telah diberikan memang benar-benar milik nasabah yang bersangkutan dan telah dilengkapi dengan surat kuasa dan juga memeriksa apakah dokumen-dokumen asli dari kepemilikan agunan telah dikuasai oleh bank. Selain itu periksa apakah agunan telah diasuransikan sehingga bank dapat meminimalisasikan risiko.
 5. Melakukan pengawasan kredit dengan cara mempelajari laporan keuangan nasabah dan memeriksa nasabah yang melakukan over draft dan over due dan cek perhitungan dendanya serta tentukan kolektibilitas kredit.
 6. Memeriksa nilai pinjaman melalui :
 - a. Periksa klasifikasi kredit kurang lancar atau kredit yang macet dan identifikasi penyebabnya.
 - b. Buat suatu analisa tingkat kolektibilitas kredit secara menyeluruh dan bandingkan dengan cadangan penyisihan piutang yang dibuat.
 - c. Periksa apakah agunan yang diberikan atas pinjaman pada kategori kurang lancar dan macet cukup memadai.

4.2.5 Tahap-tahap Audit Operasional di PT Bank Jabar Cabang Utama

Pelaksanaan audit operasional kredit pada PT Bank Jabar terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut :

1. Perencanaan Audit

- a. Penetapan tujuan pemeriksaan, dalam hal ini penetapan pemeriksaan kredit dan prosedur kreditnya.
- b. Memperoleh informasi yang telah diterima dari staf administrasi kredit. Misalnya :
 - Catatan-catatan administrasi bank telah memadai.
 - Semua transaksi-transaksi telah dicatat ke dalam masing-masing rekening buku besarnya dengan segera dan benar.
 - Aktiva bank telah diadakan pengamanan dan penjagaan yang memadai dan telah disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan bank.
- c. Menentukan sumber-sumber yang penting untuk melakukan audit selanjutnya, misalnya jaminan atau agunan kredit yang diberikan, apakah jaminan diasuransikan, apakah jaminan benar-benar atas nama debitur, cara penilaian.
- d. Pemberitahuan kepada pihak-pihak yang dianggap perlu, dalam hal ini adalah otorisasi yang berwenang misalnya pihak kredit dan yang berkaitan dengan itu.
- e. Melakukan survey, hal ini supaya dapat lebih mengenal kegiatan dan pengendalian yang diperiksa untuk mengidentifikasi luasnya audit, dan juga dapat menentukan atau menyiapkan jumlah tenaga yang akan memeriksa.
- f. Menentukan waktu pemeriksaan, bagaimana audit dilakukan dan menyampaikan laporan hasil audit kepada pimpinan cabang.

2. Menguji dan Mengevaluasi Informasi

- a. Mengumpulkan informasi yang cukup kompeten dan relevan serta kemudian memberikan tanggapan dari informasi yang telah diperoleh, contohnya : memeriksa laporan keuangan debitur

apakah benar dan tidak di *mark-up* jumlahnya, periksa kelengkapan formulir pengajuan kredit debitur.

- b. Prosedur pemeriksaan termasuk teknik pengujian dan penarikan contohnya yang dipergunakan, dalam hal ini teknik pengujian dan penarikan contohnya terlebih dahulu diseleksi dan diarahkan sesuai dengan kebutuhan kreditnya.
- c. Setelah informasi yang diperlukan terkumpul, bagian pengawasan kredit menyiapkan kertas kerja audit yang berfungsi membantu dalam pencatatan seluruh aktivitas audit.

3. Melaksanakan Audit

- a. Tahap ini meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan bukti-bukti audit dan informasi lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit.
- b. KIC PT Bank Jabar dalam tugasnya membekali dirinya dengan data akuntansi formal, terutama data laporan keuangan dengan lampiran-lampirannya pada posisi terakhir serta posisi periode audit.
- c. Angka-angka dalam laporan kemudian dicocokkan dengan lampiran-lampiran buku besar khususnya yang berkaitan dengan kredit. Tahapannya adalah meneliti catatan, buku tambahan, buku pembantu serta dokumen permohonan kredit debitur, dokumen pencairan kredit dan lain-lain.
- d. Setelah melakukan pemeriksaan maka KIC membuat laporan hasil pemeriksaan yang disertai rekomendasi.

4. Tindak Lanjut

Pada bagian ini KIC memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh *auditee* dalam hal ini adalah PT Bank Jabar Cabang Utama. Tindak lanjut ini meliputi :

a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut

Pemantauan ini harus dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan mengingatkan *auditee* bila belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan. KIC memantau dengan berbagai cara, dapat melalui temuan, catatan juga melalui laporan rutin kegiatan unit kerja *auditee* atau laporan khusus sesuai permintaan KIC.

b. Analisis kecukupan tindak lanjut

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana *auditee* telah melaksanakan perbaikan dan untuk mengetahui apakah terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Analisis kecukupan tindak lanjut ini bisa dilakukan melalui surat memo dan mengirimkan bukti penyelesaian atau perkembangan sama sekali, KIC dapat mengirimkan petugas khusus untuk melakukan review kembali.

c. Laporan tindak lanjut

Bila tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh *auditee*, maka KIC dapat memberikan laporan tertulis kepada direktur utama atau dewan audit untuk ditindak lanjuti.

Contoh tindak lanjut adalah pihak manajemen memberikan instruksi langsung pada bagian yang telah diaudit dan ternyata ada temuan dari KIC agar segera melakukan rekomendasi yang telah diberikan oleh KIC seperti : Bagian supervisor kredit harus selalu melakukan pengawasan *on the spot* atas kredit yang diberikan kepada debitur agar dapat diawasi apakah kredit yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga pelunasan pembayaran kredit kepada bank lancar.

4.2.6 Laporan Hasil Audit Operasional

Laporan hasil audit operasional bagian kredit PT Bank Jabar diterbitkan dalam bentuk laporan temuan pemeriksaan dan saran perbaikan. Biasanya laporan ini ketentuannya sebagai berikut :

1. Temuan-temuan pemeriksaan harus disusun berdasarkan urutan pentingnya yang semakin menurun. Temuan-temuan pemeriksaan yang biasa terjadi atau ditemukan oleh KIC dalam melaksanakan pemeriksaan antara lain :
 - ❖ Kesalahan dalam penyelesaian dokumentasi dan administrasi kredit, contohnya : pemberian kredit pada PT X sejak jatuh tempo belum ditanda tangani.
 - ❖ Kesalahan dalam sistem dan prosedur, misalnya uraian jabatan pada beberapa unit kerja belum lengkap. Contoh yang terjadi antara lain terdapatnya tiga karyawan pada unit administrasi kredit yang belum membuat dan mengisi uraian tugas.
 - ❖ Masalah kolektibilitas kredit pada cabang, seperti : kolektibilitas kredit pada kantor cabang terjadi penurunan di atas 5 %.
 - ❖ Pada pemeriksaan *on the spot*, kegiatan hasil debitur dari hasil kucuran kredit tidak berjalan lancar.
 - ❖ Adanya penyimpangan kredit melebihi BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).
2. Setiap temuan diberi nomor dan ditegaskan dengan kalimat yang ringkas.
3. Disediakan ruang yang cukup pada lembar temuan pemeriksaan dan saran perbaikan bagi manajemen pihak yang diperiksa untuk dapat memberikan tanggapan tertulisnya terhadap setiap temuan dan disediakan pula spasi untuk para pemeriksa, guna melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan.
4. Setiap temuan pemeriksaan dan saran perbaikan harus ditempatkan pada satu halaman terpisah.

4.2.7 Tindak Lanjut Audit Operasional oleh Manajemen

Tindak lanjut audit merupakan tahapan yang sangat penting dari seluruh proses pemeriksaan. Dalam tahap ini objek yang diperiksa harus mengambil langkah dan tindakan perbaikan yang memadai, tepat waktu dan efektif. Sehingga tidak terjadi lagi kesalahan.

PT Bank Jabar Cabang Utama telah berusaha semaksimal mungkin untuk sesegera mungkin melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan dan rekomendasi yang diberikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kantor cabang PT Bank Jabar yang menyatakan bahwa bagi kantor cabang PT Bank Jabar, instruksi perbaikan semaksimal mungkin selalu dilakukan dengan sesegera mungkin sebab hal tersebut merupakan salah satu cara penilaian yang dilakukan oleh kantor pusat terhadap kantor cabang.

Tindak lanjut PT Bank Jabar atas hasil audit operasional dilakukan melalui disposisi yang berupa perbaikan administratif adalah usaha perbaikan yang dilakukan oleh karyawan PT Bank Jabar yang menerima disposisi dari pimpinan cabang untuk melaksanakan perbaikan. Usaha perbaikan ini harus dilakukan secara periodik setiap bulan atau sesuai jadwal waktu yang dijanjikan. Sedangkan tindakan administratif merupakan tindakan yang dilakukan oleh kantor pusat, dewan direksi atau kantor cabang itu sendiri terhadap karyawan yang menolak untuk melaksanakan perbaikan yang diajukan oleh KIC. Tindakan administratif ini dapat berupa pemutusan jabatan atau pun pemutusan hubungan kerja.

4.3 Manfaat Audit Operasional Dalam Efektivitas Pemberian Kredit

Audit operasional mempunyai manfaat yang sangat penting untuk efektivitas pemberian kredit pada PT Bank Jabar Cabang Utama Bandung. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suatu pelaksanaan pemberian kredit yang sehat dan teratur, sehingga akan memperkecil risiko yang akan dihadapi oleh PT Bank Jabar atas kredit yang disalurkan.

Berdasarkan hasil penelitian, audit operasional atas pemberian kredit yang dilakukan di PT Bank Jabar mempunyai manfaat diantaranya sebagai berikut :

- **Sebagai Pendorong Efektivitas dan Efisiensi**

Audit operasional atas pemberian kredit di PT Bank Jabar bermanfaat untuk mendorong efektivitas dan efisiensi. Pelaksanaan pemberian kredit yang efektif akan diharapkan untuk menghasilkan penerimaan kredit yang efektif juga, yakni mendapatkan realisasi penerimaan kredit yang lebih besar dari yang dianggarkan, selain efektivitas maka efisiensi juga diharapkan terjadi dari audit operasional atas pelaksanaan pemberian kredit. Efisiensi diharapkan terjadi dari segi pembiayaan atas pelaksanaan pemberian kredit, dimana biaya yang diinginkan tidak terlalu besar atau signifikan.

- **Untuk Ketaatan Terhadap Hukum dan Peraturan Kredit**

Audit operasional akan mendorong para karyawan pada khususnya dan PT Bank Jabar pada umumnya untuk selalu berupaya mentaati setiap peraturan dan hukum kredit yang berlaku baik peraturan dan kebijakan yang berasal dari internal perusahaan, maupun peraturan dan kebijakan yang berasal dari pusat atau pemerintah. PT Bank Jabar telah mentaati peraturan yang digariskan oleh pemerintah mengenai pembentukan audit internal bank. Karena audit operasional akan selalu mengupayakan untuk dijalkannya setiap prosedur yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada, baik yang dibuat oleh PT Bank Jabar itu sendiri atau pun yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- **Sebagai Antisipasi Risiko Kredit**

Audit operasional berfungsi untuk menilai apakah prosedur pemberian kredit yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menimbulkan suatu pemberian kredit yang efektif dan ini juga akan membuat perusahaan untuk dapat mengantisipasi risiko kredit yang kemungkinan akan terjadi, misalnya kredit macet. PT Bank Jabar sebelum melakukan pemberian kredit melakukan penyelidikan kredit terhadap debitur yang akan meminjam kredit, dan dianalisis kredit yang dilakukan.

- **Keuntungan Maksimal**

Audit operasional atas pemberian kredit merupakan salah satu unsur yang sangat penting di PT Bank Jabar, karena dapat mencapai efektivitas dari kegiatan pemberian kredit, yang menghasilkan keuntungan yang maksimal. Saat ini PT Bank Jabar merupakan salah satu bank yang disegani di Jawa Barat ini sebagai

bank yang sehat. Untuk menjaga tingkat kesehatan bank diperlukan kondisi keuangan yang baik. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa salah satu sumber pendapatan yang paling utama dari suatu bank ialah yang berasal dari pemberian kredit. Karena itulah diperlukan suatu pengendalian internal atas kredit yang baik untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal.

- **Alat Evaluasi**

Salah satu tujuan audit operasional di PT Bank Jabar adalah sebagai alat evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan dengan membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Audit operasional atas pemberian kredit akan memberikan evaluasi tentang pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan di PT Bank Jabar apakah telah berjalan sesuai dengan tujuan kredit. Audit operasional juga mengevaluasi beberapa kelemahan yang ditemukan pada saat audit dari prosedur kredit yang telah ada, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan selanjutnya dari rekomendasi yang diberikan auditor.

4.4 Pembahasan

Setelah penjelasan hasil penelitian, maka selanjutnya penulis mencoba membahas hasil dari penelitian yang telah penulis paparkan di atas.

4.4.1 Pembahasan Pelaksanaan Audit Operasional Dalam Efektivitas Pemberian Kredit

Pembahasan dari audit operasional kredit memuat tentang komponen-komponen dari audit operasional apakah telah memadai atau tidak, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Operasional

Tujuan audit operasional adalah membantu setiap anggota organisasi untuk melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif dengan cara menyediakan analisis-analisis, penilaian, rekomendasi-rekomendasi dan komentar mengenai aktivitas yang diperiksa. Tujuan audit operasional atas pemberian kredit oleh KIC pada PT Bank Jabar adalah untuk membantu kantor cabang dalam mengawasi pelaksanaan, kebijakan, prosedur-prosedur atau peraturan-peraturan kerja yang digariskan direksi.

Ruang lingkup audit operasional terhadap pemberian kredit pada PT Bank Jabar adalah sebagai berikut :

- Penilaian seksama permohonan kredit, yaitu dengan penilaian 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*).
- Pinjaman disetujui pejabat berwenang dan telah ditelaah oleh KIC.
- Rekonsiliasi periodik atas buku besar kredit dengan sub buku besar.
- Pengecekan kelengkapan, kecermatan dan keabsahan dokumen kredit.

Selain memberikan analisis dan menilai kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, audit operasional juga harus mendorong dilakukannya tindakan korektif dan memastikan manajemen mengetahui risiko apa yang akan diterima jika tindakan korektif tidak dilakukan.

2. Independensi Auditor Operasional Kredit

Independensi auditor operasional kredit dapat dicapai melalui status organisasi dan objektivitasnya.

- Status Organisasi

Sesuai dengan hasil penelitian oleh penulis dapat dianalisis dari bagian yang melaksanakan audit operasional yaitu internal auditor atau Kontrol Intern Cabang (KIC) PT Bank Jabar, dan bertanggungjawab langsung kepada dewan direksi yang memungkinkan untuk melaksanakan audit secara luas tanpa dipengaruhi oleh unit yang diperiksa. Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa independensi audit operasional yang dilakukan PT Bank Jabar cukup memadai.

- Objektivitas

Objektivitas auditor internal pada PT Bank Jabar telah memadai terlihat dari tidak terkaitnya auditor internal dalam prosedur perkreditan.

3. Kompetensi Auditor Operasional

Kompetensi auditor operasional pada PT Bank Jabar cukup kompeten dan memiliki kemahiran Kontrol Intern Cabang yang terdiri dari satu orang

auditor, dengan pendidikan S1 (sarjana) yang menguasai auditing dan akuntansi, mengerti kasus-kasus perbankan lainnya sehingga dapat memperkecil risiko penyelewengan, selain itu selalu diberi pelatihan dan kursus-kursus singkat baik dari dalam maupun dari luar PT Bank Jabar, mengenai audit untuk menambah kualitas auditor internal.

4. Program Audit Operasional

Program audit merupakan petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan, disamping itu pula berfungsi sebagai alat pengendali. Program audit internal pada PT Bank Jabar cukup memadai, hal ini terlihat dengan adanya program audit yang diarahkan kepada tujuan kredit dan prosedur audit kredit. (contoh program audit disajikan pada lampiran)

5. Pelaksanaan Audit Operasional Kredit

Pelaksanaan audit operasional diharapkan dapat mewujudkan fungsinya secara efektif. Juga dapat meningkatkan kemampuan mengidentifikasi, mengungkapkan, dan membuktikan jika hal-hal yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan. Pelaksanaan audit operasional pada PT Bank Jabar telah memadai karena dapat terlihat dari adanya beberapa tahap yang dilakukan audit operasional dalam melaksanakan auditnya. Dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap tindak lanjut tahapan-tahapan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesempurnaan audit operasional kredit.

6. Laporan Hasil Audit Operasional Kredit

Laporan hasil audit yang dibuat oleh KIC PT Bank Jabar cukup memadai karena mencakup ruang lingkup audit, temuan audit serta saran perbaikan, dalam laporan ini auditor juga dapat memperlihatkan apa yang akan dicapai dan apa yang dapat dicapai oleh manajemen. (contoh laporan audit disajikan pada lampiran).

7. Tindak Lanjut Audit Operasional Kredit Oleh Manajemen

Tindak lanjut audit operasional merupakan tahapan yang sangat penting dari seluruh proses audit dimana dalam tahap ini objek yang diperiksa harus mengambil langkah dan tindakan perbaikan. Begitu pula tindak lanjut audit operasional pada PT Bank Jabar cukup memadai, hal ini dapat

dilihat dari adanya tindak lanjut yang berupa perbaikan administratif dan tindakan administratif seperti surat peringatan bagi yang melakukan pelanggaran ringan dan pemutusan hubungan kerja bagi pelanggaran yang berat.

4.4.2 Manfaatnya Audit Operasional Dalam Efektivitas Pemberian Kredit

Audit operasional mempunyai manfaat yang sangat penting untuk efektivitas pemberian kredit pada PT Bank Jabar Cabang Utama Bandung. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suatu pelaksanaan pemberian kredit yang sehat dan teratur, sehingga akan memperkecil risiko yang akan dihadapi oleh PT Bank Jabar atas kredit yang disalurkan.

Adapun audit operasional yang dapat meningkatkan efektivitas pemberian kredit, adalah benar-benar diyakini telah memadai.

Dapat disimpulkan kriteria-kriteria audit operasional yang memadai :

1. Sudah terdapat struktur organisasi serta uraian tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari bagian audit internal yang melaksanakan audit operasional.
2. Kedudukan auditor dalam organisasi sudah ditempatkan sedemikian rupa. Sehingga audit operasional dapat menjalankan independensi secara penuh.
3. Adanya program audit yang disusun dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan audit yang diharapkan.
4. Adanya laporan hasil audit operasional yang menunjukkan apa yang telah dicapai dan apa yang dapat dicapai serta saran perbaikan.
5. Hasil staf audit internal yang melaksanakan audit operasional yang disertai dengan saran perbaikan mendapat dukungan dari manajemen untuk ditindak lanjuti sampai tujuan audit operasional memadai.

Dengan kriteria audit operasional yang memadai di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa auditor sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas, khususnya untuk pemberian kredit. Dengan adanya peran auditor yang memadai, maka PT Bank Jabar dapat memperkecil penyelewengan dan risiko kredit yang macet.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sudah efektif sesuai dengan kriteria yang telah dikemukakan pada bab II, yaitu :

- Pemberian kredit sesuai dengan prinsip pemberian kredit yang sehat yaitu dengan menggunakan analisis 5C.
- Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan prosedur yaitu dimulai dari pengajuan permohonan kredit oleh nasabah yang selanjutnya oleh pihak bank melakukan penyelidikan terhadap berkas yang diajukan, penilaian kelayakan kredit, kegiatan wawancara, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit dan realisasi kredit.
- Adanya jaminan yang memadai dipersyaratkan oleh bank yang harus dipenuhi oleh nasabah peminjam kredit.
- Adanya keuntungan bank yang berbentuk bunga. Hal ini wajar dilakukan terutama bagi bank-bank umum, tujuannya agar mereka bisa terus *survive* dalam persaingannya dengan bank lain.
- Adanya pengembalian kredit yang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan pada saat bank melakukan penilaian kelayakan kredit yang disertai dengan kegiatan wawancara dengan nasabah peminjam.
- Adanya kolektibilitas yang tinggi.

Disamping unsur-unsur telah memadainya audit operasional yang dilakukan dibagian kredit dan pelaksanaan pemberian kredit yang telah efektif, maka disimpulkan secara keseluruhan manfaat audit operasional dalam efektivitas pemberian kredit, yaitu sebagai berikut :

❖ **Mendorong efektivitas dan efisiensi**

Audit operasional atas pemberian kredit di PT Bank Jabar bermanfaat untuk mendorong efektivitas dan efisiensi di PT Bank Jabar. Pelaksanaan pemberian kredit yang efektif akan diharapkan untuk menghasilkan penerimaan kredit yang efektif juga selain efektivitas maka efisiensi juga diharapkan terjadi dari audit operasional atas pelaksanaan pemberian kredit.

Tabel 4.1
Rencana Penerimaan Kredit

Tahun	Rupiah
2006	188.387.000.000
2007	250.000.000.000

Sumber : PT Bank Jabar Cab. Utama Bandung

Tabel 4.2
Realisasi Penerimaan Kredit

Tahun	Rupiah
2006	218.264.929.906
2007	260.696.238.866

Sumber : PT Bank Jabar Cab. Utama Bandung

Pemberian kredit pada PT Bank Jabar Cabang Utama cukup efektif, selalu mencapai target yang telah dianggarkan. Pada tahun 2007 realisasi penerimaan kredit naik sebesar 4.27% dari yang dianggarkan, walaupun ditahun 2007 diketahui bahwa ada 2% kredit kurang lancar, diragukan dan macet dari total realisasi kredit tersebut, namun hal itu terjadi bukanlah karena pengendalian yang kurang memadai, melainkan semakin menurunnya kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit yang diberikan. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Jabar telah dijalankan dengan baik karenanya penerimaan kredit telah mencapai efektivitas. Sedangkan efisiensi pemberian kredit dalam hal ini adalah biaya pemberian kredit pada PT Bank Jabar yang tidak terlalu besar dan signifikan terhadap biaya yang sudah dianggarkan yaitu 5% lebih rendah dari biaya yang dianggarkan, sebab dimulai dari tahap permohonan sampai dengan pencairan dilaksanakan di kantor, berarti debitur datang ke kantor cabang. Maka biaya kredit hanya ada pada biaya transportasi bagi pejabat lini dalam hal ini dilakukan oleh supervisor kredit, dalam melakukan kunjungan *on the spot* pemeriksaan agunan.

❖ **Untuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan kredit**

Audit operasional akan mendorong para karyawan pada khususnya dan PT Bank Jabar pada umumnya untuk selalu berupaya mentaati setiap peraturan dan hukum kredit yang berlaku baik peraturan dan kebijakan yang berasal dari internal perusahaan, maupun peraturan dan kebijakan yang berasal dari pusat atau pemerintah. PT Bank Jabar telah mentaati peraturan yang digariskan oleh pemerintah mengenai pembentukan audit internal bank. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketaatan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku cukup baik, hal ini terlihat dari prosedur kredit yang ditetapkan.

❖ **Adanya antisipasi risiko audit kredit**

Audit operasional berfungsi untuk menilai apakah prosedur pemberian kredit yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menimbulkan suatu pemberian kredit yang efektif dan ini juga akan membuat perusahaan untuk dapat mengantisipasi risiko kredit yang kemungkinan akan terjadi, misalnya kredit macet. Hal ini terlihat dengan adanya prosedur kredit yang dilakukan dengan baik oleh PT Bank Jabar yaitu dengan melakukan penyelidikan kredit terhadap debitur yang akan meminjam kredit, dan analisis kredit yang dilakukan. Penaksiran risiko dilaksanakan dengan baik, artinya PT Bank Jabar saat ini memperhatikan risiko tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

❖ **Keuntungan maksimal**

Audit operasional atas pemberian kredit merupakan salah satu unsur yang sangat penting di PT Bank Jabar, karena dapat mencapai efektivitas dari kegiatan pemberian kredit dan dengan adanya audit operasional atas pemberian kredit dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa salah satu sumber pendapatan yang paling utama dari suatu bank ialah berasal dari pemberian kredit. Karena itulah diperlukan suatu audit operasional atas pemberian kredit secara berkala, untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis dari observasi ini, terdapat suatu keunggulan yang dimiliki oleh PT Bank Jabar, yaitu adanya Kredit Guna Bakti, yaitu kredit yang diberikan khusus kepada pegawai negeri dan saat ini

Kredit Guna Bakti telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keberhasilan PT Bank Jabar.

❖ **Terdapatnya alat evaluasi**

Salah satu tujuan audit operasional di PT Bank Jabar adalah sebagai alat evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan dengan membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Audit operasional atas pemberian kredit akan memberikan evaluasi tentang pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan di PT Bank Jabar apakah telah berjalan sesuai dengan tujuan kredit. Audit operasional juga mengevaluasi beberapa kelemahan yang ditemukan pada saat audit dari prosedur kredit yang telah ada, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan selanjutnya dari rekomendasi yang diberikan auditor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, manajemen PT Bank Jabar telah memanfaatkan hasil evaluasi yang dilakukan auditor pada saat audit operasional, dengan menindak lanjuti laporan hasil audit yang diberikan auditor.

4.5 Pembuktian Hipotesis

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab I, hipotesis deskriptif yang penulis ajukan adalah bahwa audit operasional telah bermanfaat dalam pemberian kredit pada PT Bank Jabar. Penulis melakukan penelitian secara rinci mengenai manfaat audit operasional di PT Bank Jabar untuk efektivitas pemberian kredit.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka penulis mengambil simpulan bahwa pelaksanaan audit operasional pemberian kredit yang dilakukan di PT Bank Jabar telah memadai sehingga dapat bermanfaat dalam efektivitas pemberian kredit. Dimana audit operasional pemberian kredit telah efektif karena dapat membantu manajemen untuk meminimalkan risiko kredit macet. Dan memadainya audit operasional karena pelaksana audit operasional memiliki independensi dan kompetensi, dan adanya pelaksanaan audit operasional yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu : tahap perencanaan audit, pengumpulan dan evaluasi bukti, pelaporan dan tindak lanjut. Audit operasional bagian kredit juga terbukti mempunyai manfaat yaitu sebagai pendorong efektivitas dan efisiensi pemberian kredit, sebagai pendorong untuk ketaatan karyawan khususnya bagian kredit untuk mematuhi ketaatan terhadap peraturan

keuntungan yang maksimal dan sebagai alat evaluasi bagi manajemen.

Untuk meyakinkan hasil hipotesis tersebut, penulis melakukan penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada tiga orang responden. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan kuesioner yang diperoleh dari 3 orang responden tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Score jawaban variabel Manfaat Audit Operasional Dalam Efektivitas Pemberian Kredit

Responden Jawaban	Satu	Dua	Tiga	Total
Ya	26	27	26	79
Tidak	2	1	2	5

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang telah penulis peroleh, jawaban “ya” didapat sebanyak 79 dari 84 pertanyaan kuesioner, dan dilakukan persentase maka jawaban “ya” yang menyatakan bahwa audit operasional bermanfaat dalam efektivitas pemberian kredit sebesar 94.05%. ini berarti bahwa audit operasional bermanfaat dalam efektivitas pemberian kredit. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa audit operasional pada PT Bank Jabar bermanfaat dalam efektivitas pemberian kredit. Dengan demikian hipotesis deskriptif yang telah dikemukakan bahwa “audit operasional telah bermanfaat dalam pemberian kredit pada PT Bank Jabar” dapat diterima.